

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan disebut juga dengan masalah sosial, dikarenakan permasalahan tersebut terjadi di lingkungan sosial (masyarakat). Tentu saja permasalahan tersebut dapat terjadi kapan pun dan dimanapun, baik terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Masalah kependudukan ini terjadi dikarenakan perkembangan penduduk yang tidak sesuai atau tidak seimbang. Ada beberapa masalah kependudukan, diantaranya ialah pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan tingkat pendidikan. Dari ketiga permasalahan penduduk tersebut, pertumbuhan penduduklah yang menarik untuk dikaji (Bidarti, 2020).

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai berbagai masalah yang berkembang di masyarakat, dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi dan berkualitas merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Kepadatan penduduk merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara dan diantaranya adalah Indonesia. Permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar, kepadatan penduduk dan persebarannya tidak merata, struktur usia penduduk yang tidak seimbang yaitu antara penduduk yang produktif (15-64 tahun) dengan

penduduk yang non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) (Fahmi dan Pinem, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dapat kita lihat dari data hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) semakin tahun penduduk Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari (BPS, 2020), jumlah penduduk Indonesia pada bulan September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.

Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk bisa dijadikan potensi dan beban dalam satu waktu bagi suatu negara. Dapat dikatakan potensi apabila jumlah penduduk sesuai atau seimbang dengan sumber daya yang ada, dan dapat dikatakan beban bagi negara apabila jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduk maka akan terjadi beberapa masalah seperti kualitas sumber daya manusia yang menurun, pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, hingga berkurangnya bahan pangan atau gizi yang buruk. Dengan adanya permasalahan tersebut, akan berdampak buruk dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat (Triyastuti, 2019). Untuk menghindari hal tersebut, tentu diperlukan solusi agar pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikendalikan. Pertambahan penduduk yang tidak tertanggulangi akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam yang disebabkan oleh ketidakseimbangannya penyediaan bahan pangan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Untuk mengatasi jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya, baik itu di Indonesia maupun di negara lain dengan diberlakukannya kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan merupakan salah satu upaya yang dapat mengontrol jumlah dan pertumbuhan penduduk dengan mempengaruhi tiga variabel kependudukan, diantaranya yaitu kelahiran, kematian, dan imigrasi. Pemerintah Indonesia memiliki upaya dalam mengatasi hal tersebut, yaitu : (1) Mengsucceskan program keluarga berencana (KB), (2) Melakukan pembatasan usia perkawinan dengan diberlakukannya undang-undang perkawinan, dan (3) Adanya program pendidikan kependudukan dan penyuluhan kepada masyarakat (Harahap, 2019).

Keluarga berencana (KB) di Indonesia berdiri sejak 23 Desember 1957 dengan nama Program Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), kemudian pada 17 Oktober 1968 diubah menjadi Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Pada 29 Juni 1970 diubah kembali menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan sesuai dengan UU No. 52 Tahun 2009 diubah lagi menjadi Gerakan Keluarga Berencana Nasional (Fahmi dan Pinem, 2018). Gerakan Keluarga Berencana Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga juga bangsa. Adapun tujuan lain yaitu untuk meningkatkan keadaan kehidupan masyarakat dengan menurunkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi produktivitas (Fahmi dan Pinem, 2018).

Keluarga berencana merupakan salah satu cara pemerintah yang dilakukan untuk mengontrol angka kelahiran anak, jarak, usia yang ideal untuk melahirkan, dan mengontrol kehamilan. Pemerintah Indonesia selalu mensosialisasikan kepada masyarakat dengan slogan program KB, yaitu “Dua Anak Lebih Baik”. Petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dengan giat mengunjungi rumah warga yang baru saja melahirkan, petugas selalu menghimbau kepada masyarakat agar mengikuti program KB tersebut. Pemerintah memberikan alat kontrasepsi sesuai yang dibutuhkan kepada masyarakat dengan gratis, pemerintah juga mengurangi biaya pemasangan alat kontrasepsi tersebut seperti di puskesmas dan rumah sakit (Wardani, 2010).

Untuk mengukur atau menyukseskan program KB, Indonesia telah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam (Perpres No. 62 Tahun 2010) dikemukakan bahwa BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. BKKBN memiliki tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 1 menyatakan bahwa keluarga berencana merupakan salah satu upaya dalam mengontrol angka kelahiran anak, jarak dan usia ideal dalam melahirkan, mengontrol kehamilan, melalui

promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.

Dalam sebuah program yang telah dibuat, tentu dibutuhkannya partisipasi masyarakat agar program tersebut dapat dikategorikan berhasil dan berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Dan program dapat dikatakan gagal apabila tidak ada respon dan partisipasi dari masyarakat (Damayanti, 2017). Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam sebuah program yang sedang berjalan untuk mencapai tujuan program tersebut. (Gordon Allport, 1945) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan suatu kesertaan baik dari segi ego pribadi maupun jasmani/fisik.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, partisipasi masyarakat dilakukan secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tergantung pandangan diri masing-masing masyarakat tersebut terhadap pelaksanaan program keluarga berencana yang di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah pendidikan, keadaan ekonomi, dan pengaruh dari sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut (Lismawati, 2016). Dalam program keluarga berencana ini sering terjadi hanya wanita yang dijadikan objek dengan alasan untuk pencapaian target oleh program tersebut. Hal ini wanita diandalkan oleh program keluarga berencana dikarenakan jenis kontrasepsi rata-rata di desain untuk wanita. Dalam

program keluarga berencana, seharusnya bukan hanya wanita saja yang berpartisipasi melainkan juga pria ikut berpartisipasi (Siregar, 2019).

Kota Matsum III merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kecamatan Medan Kota memiliki penduduk sebanyak 84.666 jiwa, dengan luas wilayah yaitu 5,98 km². Kecamatan Medan Kota berbatasan dengan Kecamatan Medan Maimun di sebelah barat, Medan Area di sebelah timur, Medan Amplas di bagian selatan, dan Medan Perjuangan di bagian utara. Kecamatan Medan Kota memiliki 12 kelurahan, diantara 12 kelurahan tersebut Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota merupakan kelurahan dengan penduduk terpadat. Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota memiliki luas wilayah yaitu 0,31 km². Jumlah penduduk Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota yaitu sebanyak 6.369 jiwa dengan angka kepadatan penduduk 19,85/km². Mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota yaitu pedagang dan pegawai swasta.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota merupakan kelurahan dengan partisipasi terendah KB yang ada di Kota Medan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Medan Kota sebanyak 5.743 PUS dan di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota sebanyak 424 PUS. Dan data yang penulis peroleh dari BKKBN SUMUT total Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB di

Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota pada Mei 2022 sebanyak 322 PUS. Hal tersebut terbukti bahwa masih rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat terhadap program keluarga berencana ini. Rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) pada Keluarga Berencana (KB) dikarenakan beberapa alasan diantaranya yaitu adanya keinginan menunda kelahiran, usia pernikahan yang masih dini, dan sudah berada di usia subur yang rentan terhadap kehamilan serta rentan terhadap kelahiran. Karakteristik masyarakat kota identik dengan berpendidikan tinggi serta tingkat penerimaan atas informasi yang diberikan juga tinggi. Maka seharusnya angka partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) pada pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota tinggi, akan tetapi dapat dilihat dari data yang telah dijabarkan diatas bahwa angka partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) pada pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota tergolong sangat rendah. Maka dari itu, perlu dianalisis atau dicermati bagaimana persepsi masyarakat mengenai keluarga berencana dan faktor apa yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga kurangnya atau rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu diteliti mengenai karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, persepsi Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana (KB), dan faktor-faktor apa saja yang dapat

menyebabkan rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tingginya angka kepadatan penduduk di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
2. Rendahnya tingkat partisipasi mengikuti pelaksanaan keluarga berencana (KB) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) pada pelaksanaan keluarga berencana di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dalam mengikuti program keluarga berencana
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) pada pelaksanaan keluarga berencana

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan?
2. Bagaimana partisipasi tidak aktif Pasangan Usia Subur (PUS) pada pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan?
3. Faktor apa yang menyebabkan tingginya angka Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
2. Untuk mengetahui partisipasi tidak aktif Pasangan Usia Subur (PUS) pada pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Kota Mastum III, Kota Medan
3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya angka Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang sama.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang program keluarga berencana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana di Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya program keluarga berencana dan dapat mengikuti program keluarga berencana tersebut.
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai program keluarga berencana